

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Manajemen Berbasis Sekolah

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Istilah manajemen berbasis sekolah adalah terjemahan langsung dari School Based Management (SBM). Istilah ini mula-mula muncul di Amerika Serikat tahun 1970-an sebagai alternatif untuk mereformasi pengelolaan pendidikan atau sekolah.¹

Secara bahasa, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Menurut Sri Minarti manajemen adalah "proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran".² Sedangkan manajemen menurut George Terry sebagaimana dikutip oleh Nur Zazin adalah "suatu tindakan perbuatan seseorang yang berhak menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu, sedangkan tanggungjawab tetap di tangan yang menyuruh".³

Sedangkan berbasis berasal dari kata basis yang menurut Audi berarti "dasar atau pangkalan".⁴ Dan mengenai sekolah, Audi mengatakan "sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran".⁵ Jadi berdasarkan makna per kata tersebut, manajemen berbasis sekolah dapat

¹Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi* (Jakarta: Grasindo, 2003), 1-2.

²Sri Minarti, *Manajemen Sekolah* (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), 50.

³Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan* (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), 27.

⁴Audi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Indah Surabaya, 1995), 27.

⁵Ibid., 212.

diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah dalam proses pengajaran atau pembelajaran.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) didefinisikan secara beragam oleh para ahli pendidikan, yaitu:

- a. Mallen, Ogawa, dan Kranz sebagaimana dikutip oleh Hadiyanto memandang MBS sebagai suatu bentuk desentralisasi yang memandang sekolah sebagai suatu unit dasar pengembangan dan bergantung pada redistribusi otoritas pengambilan keputusan.⁶
- b. Candoli, sebagaimana dikutip oleh Ibtisam memandang MBS sebagai suatu cara untuk memaksa sekolah itu sendiri mengambil tanggungjawab atas apa yang terjadi pada anak menurut *jurisdiksinya* dan mengikuti sekolahnya. Konsep ini menegaskan bahwa, ketika sekolah itu sendiri dibebani dengan pengembangan total program kependidikan yang bertujuan melayani kebutuhan-kebutuhan anak dalam mengikuti sekolah khusus itu, personel sekolah akan mengembangkan program-program yang lebih meyakinkan karena mereka mengetahui para siswa dan kebutuhan-kebutuhan mereka.⁷
- c. Kistono berpendapat bahwa MBS merupakan suatu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang

⁶Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 67.

⁷Ibtisam Abu Dohou, *School Based Management* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 16.

tua siswa dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.⁸

- d. Mulyasa dalam bukunya *Manajemen Berbasis Sekolah* mengatakan, "MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional".⁹

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat kita pahami bahwa titik tekan dari manajemen berbasis sekolah adalah adanya kewenangan sekolah untuk mengatur rumah tangganya, berkaitan dengan fungsi utamanya yaitu sebagai lembaga pendidikan. Kewenangan ini tidak lain untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi program pendidikan, dengan asumsi bahwa dengan adanya hak yang besar, akan meningkatkan rasa memiliki serta tanggung jawab dari pelaksananya.

Berdasarkan deskripsi tersebut, manajemen berbasis sekolah merupakan pemberian otonomi penuh kepada sekolah untuk secara aktif kreatif serta mandiri dalam mengembangkan dan melakukan inovasi dalam berbagai program untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah sendiri yang tidak lepas dari kerangka tujuan pendidikan nasional dengan melibatkan tokoh yang berkepentingan (*stakeholder*) serta sekolah harus pula mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

⁸Kistono, "*Manajemen Berbasis Sekolah*". Makalah disampaikan pada kegiatan diklat tingkat lanjut uji kompetensi guru oleh LMPM, Jawa Timur, 2006.

⁹Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 24.

Jika dimaknai lebih sempit MBS hanya mengarah pada perubahan tanggungjawab dari pemerintah kepada sekolah, meliputi pengelolaan anggaran, personel, dan kurikulum. MBS juga memberikan hak kontrol proses pendidikan kepada sekolah, guru, siswa, masyarakat dan orang tua dengan melibatkan *stake holder* lokal. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam MBS dapat meningkatkan lingkungan belajar yang efektif bagi siswa. Dan dengan meningkatnya eektivitas belajar bagi siswa, maka prestasi belajar siswa, baik akademik maupun non akademik akan meningkat.

Dalam konsep manajemen berbasis sekolah, sekolah diberikan kebebasan dan keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah serta dengan mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat setempat.

2. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Levacic, sebagaimana dikutip oleh Sri Minarti menjelaskan bahwa dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ada tiga karakteristik yang menjadi ciri khas dan harus dikedepankan yaitu:

- a. Kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang didesentralisasikan kepada para *stakeholder* sekolah.
- b. Domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan mencakup kurikulum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, penerimaan siswa baru.
- c. Diperlukan regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawan pemerintah.¹⁰

¹⁰Sri Minarti, *Manajemen Sekolah* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 56

Jika melihat karakteristik yang dideskripsikan tersebut berdasarkan pada aspek geografis Indonesia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, akan berimplikasi pada kemampuan dan ciri khas bagi sekolah dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Namun ciri khas tersebut diharapkan dapat memberikan implikasi positif terhadap peningkatan personel sekolah. Atas dasar tersebut, karakteristik sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) perlu mengoptimalkan aspek tertentu, yaitu meningkatkan kinerja organisasi sekolah, proses pembelajaran, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan administrasi.

Selain itu, kerja sama antara warga sekolah yang meliputi guru, pegawai, peserta didik, serta wali murid dan masyarakat harus dibangun atas dasar kredibilitas yang tinggi. Sekolah harus mampu mengajak masyarakat untuk ikut merasa memiliki lembaga sekolah yang bersangkutan untuk menumbuhkan iklim kerja sama dengan menganut sistem prinsip transparansi, baik dalam program maupun dalam hal pengelolaan financial (keuangan), dan juga program yang tersusun oleh komponen sekolah harus mampu bersifat berkelanjutan.

3. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Mulyasa dalam bukunya *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi* mengatakan bahwa tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola

sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.¹¹

Secara khusus, tujuan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah adalah:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah.
- d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.¹²

¹¹Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 13.

¹²Hadiyanto, *Mencari Scsok Desentralisasi.*, 71.

Pemberian otonomi yang besar bagi sekolah dalam pengelolaan rumah tangganya, akan berdampak pada meningkatnya efisiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan, karena sekolahlah yang lebih tahu tentang kebutuhan dan kondisinya. Kewenangan ini juga menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab personel yang lebih besar yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja personel-personel tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah ini sangat tergantung pada kemampuan Kepala Sekolah selaku manajer utama di organisasi sekolah, karena Kepala Sekolahlah yang bertanggung jawab mengelola dan memberdayakan berbagai sumber yang tersedia dan dapat digali dari masyarakat serta orang tua siswa untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah.

4. Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Emam Suparman sebagaimana dikutip oleh Mulyono mengatakan bahwa, dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), ada beberapa manfaat yang dapat diraih antara lain yaitu:

- a. Sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya dan lembaga-lembaga lain.
- b. Dengan demikian sekolah dapat mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan lembaganya.
- c. Sekolah lebih mengetahui sumberdaya yang dimilikinya dan input pendidikan yang akan dikembangkan serta didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- d. Sekolah dapat bertanggung jawab dalam mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin

untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.

- e. Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah setempat.¹³

Sedangkan menurut Eka Prihatin, dengan menerapkan manajemen pola MBS, sekolah lebih berdaya dalam beberapa hal berikut:

- a. Menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah tersebut.
- b. Mengetahui sumber daya yang dimiliki dan “input” pendidikan yang akan dikembangkan.
- c. Mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya.
- d. Bertanggungjawab terhadap orang tua, masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah.
- e. Persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha kreatif-inovatif untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan.¹⁴

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam Manajemen Berbasis Sekolah memiliki manfaat penting dalam bidang pendidikan, karena di dalam bidang pendidikan tersebut dapat dikelola secara baik yaitu mencapai kualitas, produktivitas, efektifitas, dengan memberikan kepercayaan kepada sekolah bahwa mereka paling menguasai dan memiliki kemampuan untuk mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia. Dengan MBS terdapat kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan dan melalui keterlibatan antara guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan sekolah

¹³Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-ruzz media, 2009), 154.

¹⁴Eka Prihatin, *Teori Administrasi Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 154.

serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid yang dapat menunjang prestasi, baik akademik maupun non-akademik.

B. Tinjauan Tentang Kecakapan Hidup (*Life Skills*)

1. Pengertian Kecakapan Hidup (*Life Skills*)

Kecakapan hidup (*life skills*) diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mampu memecahkan permasalahan hidup secara wajar dan menjalani kehidupan secara bermartabat tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.¹⁵

Jamal mengutip pendapat Malik Fajar yang mengatakan bahwa, *life skills* adalah kecakapan yang dibutuhkan untuk bekerja selain kecakapan dalam bidang akademik. Sementara itu team *Board Base Education* Depdiknas mendefinisikan *life skills* sebagai kecakapan yang dimiliki oleh seseorang agar berani dan mau menghadapi segala permasalahan kehidupan dengan aktif dan proaktif sehingga dapat menyelesaikannya. Sedangkan Slamet PH mendefinisikan *life skills* sebagai kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia. Kecakapan tersebut mencakup segala aspek sikap dan perilaku manusia sebagai bekal untuk menjalankan kehidupannya.¹⁶

¹⁵Departemen Agama, *Pedoman Integrasi Life Skill dalam Pembelajaran di MI & MTs* (Jakarta: Dirjen Bagais, 2005), 11.

¹⁶Jamal Ma'mur Asmani, *Sekolah Life Skills Lulus Siap Kerja* (Jogjakarta: Diva Press, 2009) 30.

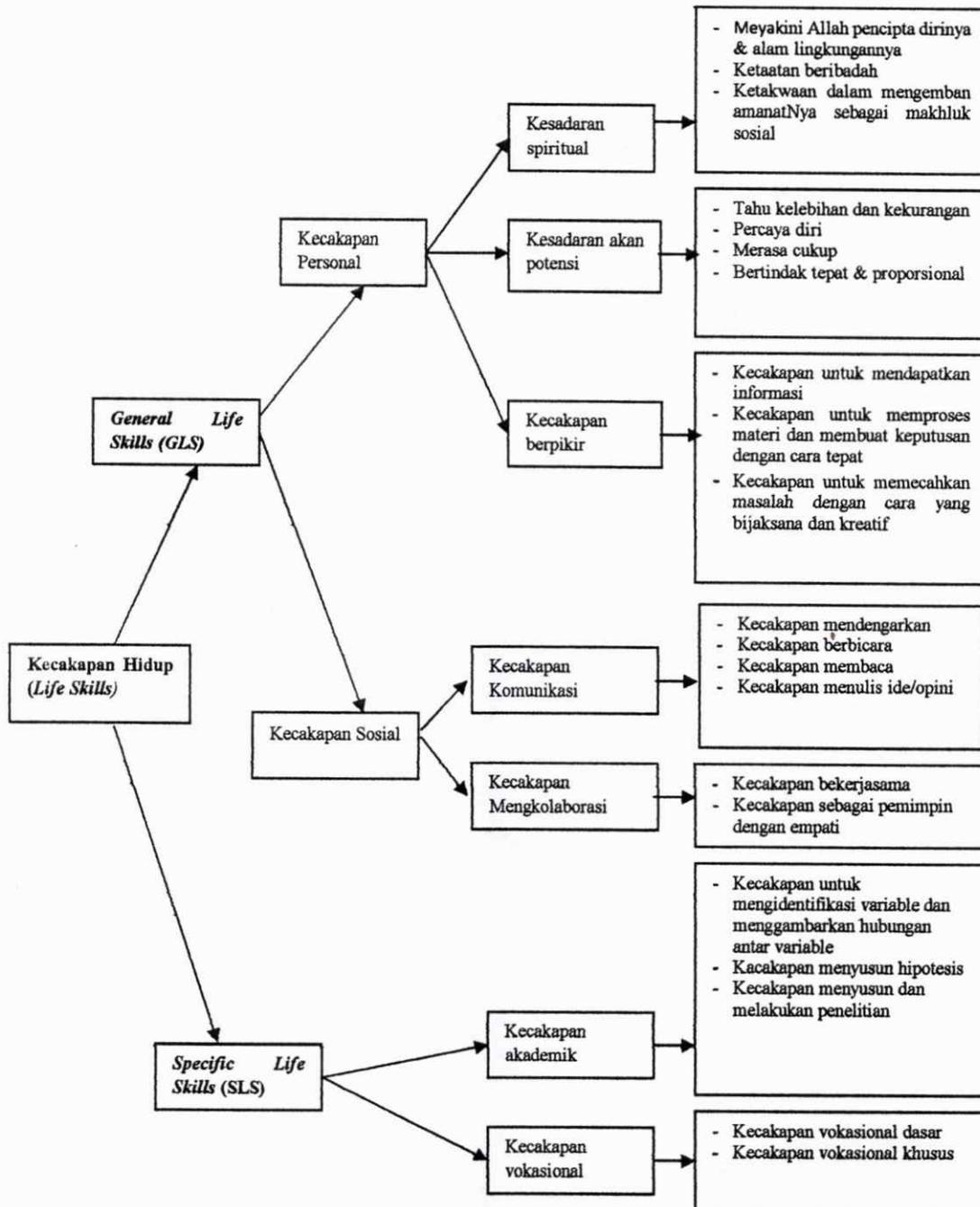
Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa kecakapan hidup (*life skills*) secara garis besar merupakan kecakapan-kecakapan yang secara praktis dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan.

Kecakapan hidup (*life skills*) bukan hanya berorientasi pada kecakapan kerja saja, namun lebih luas dari itu, yaitu sekelompok kemampuan individu untuk eksis dalam kehidupannya. Maksudnya, disamping seseorang mempunyai kecakapan dalam suatu kejuruan atau bidang tertentu, ia juga memiliki ketrampilan dasar yang menunjang dan membekali dirinya untuk dapat eksis di kehidupannya. Jika kecakapan hidup hanya diartikan sebagai kecakapan kerja belaka, tentu ini hanya akan menjadikan seseorang menjadi generasi yang terampil dalam satu bidang saja dan kurang cakap untuk menghadapi problematika yang dihadapi dalam hidupnya.

2. Aspek-Aspek kecakapan Hidup (*Life Skills*)

Secara garis besar, kecakapan hidup dapat di kelompokkan menjadi dua, kecakapan hidup yang bersifat umum (*General LifeSkills/GLS*) dan kecakapan hidup yang bersifat khusus (*Spesifik Life Skills/SLS*).¹⁷ Untuk memperjelas cakupan dari kecakapan hidup tersebut berikut bagan yang menggambarkan bagian-bagian kecakapan hidup.

¹⁷Departemen Agama, *Pedoman Integrasi Life Skill*, 11.



Bagan Aspek-aspek kecakapan hidup.¹⁸

¹⁸Jamal Ma'mur Asmani, *Sekolah Life Skills Lulus Siap Kerja.*, 39.

Dari skema tersebut, dapat kita pahami, bahwa *life skills* (kecakapan hidup) meliputi kecakapan hidup yang bersifat umum dan kecakapan hidup yang bersifat khusus yang masing-masing meliputi aspek tersendiri. Untuk memperjelas tentang aspek-aspek kecakapan hidup, berikut akan dipaparkan uraian penjelasan mengenai masing-masing aspek kecakapan tersebut.

a. Kecakapan yang bersifat umum (*General Life Skills*)

Kecakapan hidup yang bersifat umum merupakan kecakapan yang diperlukan oleh siapapun, baik yang bekerja, yang tidak bekerja dan yang sedang menempuh pendidikan. Kecakapan ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Kecakapan personal (*personal skill*)

Kecakapan personal dapat diartikan sebagai kecakapan untuk mengenal diri yaitu suatu kemampuan berdialog yang diperlukan seseorang untuk dapat mengaktualisasikan jati diri dan menemukan kepribadiannya dengan cara menguasai serta merawat jiwa dan raga. kecakapan ini meliputi: kesadaran spiritual, kesadaran berfikir dan kecakapan berpikir.

2) Kecakapan sosial (*social skill*)

Manusia selain sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lain, dalam pergaulan inilah manusia dituntut untuk mempunyai kecakapan sosial agar terjadi

keselarasan dalam hidup bermasyarakat. Kecakapan sosial meliputi: kecakapan komunikasi (*communication skill*) dan kecakapan bekerjasama (*collaboration skill*)

b. Kecakapan yang bersifat khusus (*Spesifik Life Skills/SLS*)

Merupakan kecakapan yang diperlukan seseorang untuk menghadapi permasalahan pada bidang-bidang tertentu. Kecakapan ini meliputi kecakapan akademik dan kecakapan vokasional.

1) Kecakapan akademik (*academic skill*)

Kecakapan akademik dapat disebut sebagai kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah. Kecakapan ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir pada *General Life Skills*. Jika kecakapan berfikir pada GLS masih bersifat umum, maka kecakapan akademik merupakan bagian yang lebih terfokus pada kegiatan yang bersifat akademik/keilmuan. Kecakapan ini lebih cocok untuk dikembangkan pada jenjang pendidikan menengah serta perguruan tinggi.

2) Kecakapan vokasional (*vocational skill*)

Kecakapan vokasional disini adalah kecakapan yang berkaitan dengan suatu bidang kejuruan/ keterampilan yang meliputi keterampilan fungsional, keterampilan bermatapencarian seperti menjahit, kewirausahaan, bertani, beternak, otomotif, dan lain lain. Kecakapan ini lebih mengarah pada kecakapan pada bidang pekerjaan yang mengandalkan keterampilan psikomotorik dari pada kecakapan berpikir ilmiah. Sebagai contohnya adalah kecakapan yang ditanamkan pada siswa

sekolah menengah kejuruan sebagai jenjang pendidikan yang membekali siswanya dengan keterampilan pada bidang pekerjaan tertentu dengan menitikberatkan pada ranah psikomotorik.

3. Tujuan dan Manfaat Pendidikan yang Berorientasi pada Pengembangan Kecakapan Hidup (*Life Skills*)

Pada dasarnya manusia telah dibekali dengan kelebihan-kelebihan potensial yang sangat luar biasa, sehingga diperlukan proses pendidikan yang mengoptimalkan kelebihan-kelebihan manusia tersebut. Oleh karena itu pendidikan sudah seharusnya mengoptimalkan berkembangnya potensi peserta didik menjadi kompetensi atau kemampuan untuk terampil dalam kehidupannya, diantaranya melalui pendidikan yang berorientasi pada *life skills*.

Konsep pendidikan *life skills* sangat tepat untuk menjadi terobosan baru dunia pendidikan dalam menjawab persoalan pendidikan nasional yang terkait dengan lulusan yang dinilai kurang kompeten serta belum mempunyai keterampilan yang memadai.

Menurut Muksin Wijaya yang dikutip oleh Jamal, pendidikan kecakapan hidup bertujuan mengembangkan potensi peserta didik yang merupakan filosofi pendidikan sebenarnya. Secara khusus, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) memiliki beberapa tujuan:

- a. Mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problem yang dihadapi.

- b. Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis keluasan (*broad based education*).
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di lingkungan sekolah, dengan memberikan peluang pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat, sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (*school based management*).
- d. Memberikan wawasan yang luas dalam mengembangkan karier.
- e. Memberikan bekal dengan latihan dasar tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.¹⁹

Tujuan khusus dari pendidikan kecakapan hidup adalah (1) mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah, (2) memberikan wawasan yang luas mengenai pengembangan karir peserta didik, dan (3) memberikan bekal dengan latihan dasar tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, (4) memberikan kesempatan kepada madrasah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas, dan (5) mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di lingkungan madrasah dan di masyarakat.²⁰

Selaras dengan pendapat Slamet PH yang menjelaskan spesifik dari tujuan pendidikan kecakapan hidup dapat dikemukakan sebagai berikut. *Pertama* memperdayakan aset kualitas bathiniyyah sikap dan perbuatan lahiriyah peserta

¹⁹Jamal Ma'mur Asmuni, *Sekolah Life Skills*, 75.

²⁰Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag RI, *Panduan Teknis*, 51.

didik melalui pengenalan (*logos*), penghayatan (*etos*) dan pengalaman (*patos*) nilai-nilai kehidupan sehari-hari sehingga dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup dan pengembangannya. *Kedua* memberikan wawasan yang luas tentang pengembangan karir dan penyiapan karir. *Ketiga* memberikan bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar mengenai nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang dapat memampukan peserta didik untuk berfungsi menghadapi kehidupan masa depan yang sarat dengan kompetensi dan kolaborasi sekaligus. *Keempat* mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya sekolah melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah dengan mendorong peningkatan kemandirian sekolah, partisipasi stakeholder, dan fleksibilitas peserta didik dalam memecahkan permasalahan kehidupan yang dihadapi sehari-hari, misalnya kesehatan mental, fisik, narkoba, kekerasan dan kemajuan iptek.²¹

Esensi pendidikan yang berorientasi pada *life skills* tidak lain merupakan usaha meningkatkan relevansi pendidikan dengan nilai-nilai kehidupan nyata, sebagai jembatan antara kegiatan di sekolah dengan kehidupan nyata.

Dapat disebutkan secara umum manfaat pendidikan kecakapan hidup ini bagi peserta didik adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan problem hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat, maupun warga negara.

²¹Slamet PH, " Pendidikan Kecakapan Hidup Konsep Dasar ",
(<http://www.infodiknas.com/pendidikan-kecakapan-hidup-konsep-dasar>) diakses 22 Desember 2012.